



Diplomacy Blue Economy: Pengaruh Indian Ocean Rim Association (IORA) terhadap Keberlanjutan Kelestarian Laut Indonesia

Yolanda^{1*}, Atika Puspita Marzaman²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Indonesia

Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Email : harjumyolanda5@gmail.com, tika.marzaman@gmail.com

Abstracct. *Indonesia as an archipelago country must pay attention to its policies and their impact on marine sustainability. This also includes its membership in various regional organizations, including the Indian Ocean Rim Association (IORA). Therefore, this article discusses the implementation of Indonesian policies with the blue economy concept which is studied through membership in IORA. This article aims to examine the influence of the implementation of the blue economy on the sustainability of Indonesia's seas. The method used is a literature study carried out with a qualitative-descriptive approach using maritime diplomacy and blue economy theories. The data used in this paper is secondary data which includes sources from books, journals, trusted and relevant websites as well as official and trusted news. There are challenges in implementing the blue economy in Indonesia, such as robbery, piracy and illegal fishing which can have a negative impact on marine sustainability, as well as marine pollution and unsustainable marine exploitation. So through maritime safety & security which includes piracy, armed robbery at sea, terrorism, decreasing marine sustainability, and exploitation of marine resources which are IORA's priority areas. The results of this research show that there are positive implications of Indonesia's blue economy concept with other IORA member countries for the sustainability of Indonesia's seas.*

Keywords: *IORA, Blue Economy, Maritime Diplomacy, Ocean Sustainability.*

Abstrak. Indonesia sebagai negara kepulauan harus memperhatikan kebijakannya dan dampaknya terhadap kelestarian laut. Hal ini juga meliputi keanggotaannya di berbagai organisasi regional, termasuk *India Ocean Rim Association* (IORA). Oleh karena itu, dalam tulisan ini membahas mengenai implementasi kebijakan Indonesia dengan konsep *blue economy* yang dikaji melalui keanggotaan di IORA. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh implementasi *blue economy* terhadap kelestarian laut Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deksriptif dengan menggunakan teori diplomasi maritim dan *blue economy*. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder yang meliputi sumber dari buku, jurnal, situs website terpercaya dan relevan serta berita resmi dan terpercaya. Terdapat tantangan dalam pelaksanaan *blue economy* di Indonesia seperti perampokan, pembajakan, dan penangkapan ikan secara ilegal yang dapat berdampak buruk terhadap kelestarian laut, serta polusi laut dan eksploitasi laut yang tidak berkelanjutan. Sehingga melalui *maritime safety & security* yang meliputi pembajakan, parampokan bersenjata di laut, terorisme, penurunan kelestarian laut, dan eksploitasi sumber daya laut yang merupakan area prioritas IORA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat implikasi positif konsep *blue economy* Indonesia dengan negara anggota IORA lainnya terhadap kelestarian laut Indonesia.

Kata kunci: *IORA, Blue Economy, Diplomasi Maritim, Kelestarian Laut.*

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari wilayah lautan yang lebih luas dibandingkan daratan. Wilayah laut Indonesia mencapai 70% dengan luas garis pantai mencapai ± 81.000 km (Trixie dalam Riwanto, Agus et all, 2023). Berdasarkan hal tersebut potensi sumber daya laut dan kemaritiman Indonesia sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang terdiri dari 17.504 pulau

diseluruh wilayah Indonesia yang meliputi 7.870 pulau yang telah memiliki nama dan 9.634 yang belum memiliki nama (Fitriani I. N. & Juhadi, M. A., 2018). Terlebih lagi Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang merupakan pertemuan arus panas dan dingin yang menyebabkan sumber daya laut Indonesia sangat beragam. Indonesia juga terletak diantara dua samudera yaitu samudera hindia dan samudera pasifik yang menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional (Sukamto, 2017).

Sejarah maritim Indonesia memiliki pengaruh yang besar di wilayah Asia Tenggara bahkan Asia. Hal ini didasarkan pada wilayah laut Indonesia yang luas sehingga berbagai aktivitas kehidupan terjadi di laut. Pelaut Indonesia menguasai lautan Nusantara, bahkan mencapai pesisir Madagaskar, Afrika Selatan (Wiranto, Surya., 2020). Namun, Kejayaan kemaritiman Indonesia mengalami kemunduran setelah masuknya kekuatan Eropa yang kemudian mendirikan kota-kota pelabuhan seperti Portugis di Malaka, Spanyol di Manila, dan Belanda di batavia abad ke-17. Yang dimana, tempat-tempat tersebut menjadi pusat perdagangan koloni negara-negara Eropa di Asia Tenggara (Frederick dalam Darmawangsyah et all., 2023). Perjanjian Giyanti 1755 yang disepakati oleh Belanda dengan Raja Surakarta dan Raja Yogyakarta menyebabkan penyerahan hasil perdagangan wilayahnya kepada Belanda (Prasetya dalam Wiranto, Surya., 2020).

Sejarah maritim tersebut menjadikan Indonesia lebih unggul dalam aspek budaya maritim dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan. Indonesia memiliki daerah perikanan laut sekitar 6,85 juta km² dan diperkirakan mencapai 10 juta ton setiap tahunnya. Namun, dibandingkan dengan sektor lain seperti pertanian, sektor kelautan dalam pengelolaannya terbilang belum maksimal (Prasetya dalam Wiranto, Surya., 2020). Dengan melimpahnya sumber daya laut yang menjadi potensi tersendiri Indonesia tentu saja menjadi dorongan terhadap pemerintah untuk memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya laut tersebut. Laut dapat menjadi salah satu landasan utama pembangunan Indonesia (Sukamto, 2017). Terdapat berbagai strategi dan kebijakan yang telah diterapkan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya laut.

Pada tanggal 13 September 1957 resmi di umumkan azas Indonesia sebagai negara kepulauan melalui deklarasi H. Djuanda mengenai batas laut Indonesia diperlebar menjadi 12 mil (Hatta dalam Suhardono, Edi., 2023). Kemudian, pada tanggal 10 Desember 1982 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menerima klaim Indonesia mengenai batas laut teritorial dalam konvensi PBB tentang *United Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Kehidupan maritim masa Orde Lama telah terdapat prinsip kemaritiman

Indonesia seperti Wawasan Nusantara yang dideklarasikan oleh Presiden Soekarno (Suhardono, Edi., 2023). Wawasan Nusantara merupakan prinsip yang dibangun melalui kondisi geopolitik bangsa. Esensi dari Wawasan Nusantara terletak pada pelaksanaan prinsip tersebut yang mengedepankan kondisi geografis, sejarah, dan kondisi sosial-budaya dalam mewujudkan tujuan nasional (Mulyati, 2020).

Kehidupan maritim Indonesia pada masa Orde Baru dapat dilihat dari perjuangan diplomatis Presiden Soeharto dalam mendapatkan pengakuan internasional dan regional mengenai konsep Negara Nusantara. Gagasan mengenai Negara Nusantara memperoleh pengakuan internasional pada tahun 1982 dalam konvensi PPP tentang hukum laut 1982 (Suhardono, Edi., 2023). Namun, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru tidak mendukung pelaut domestik unggul dalam mengelola sumber daya laut, muatan dalam negeri pada masa tersebut menurun menjadi 47% sedangkan muatan ekspor-impor mencapai 96%. Hal ini menandakan pemanfaatan sumber daya laut masih dikuasai oleh kapal asing sejak tahun 1998. Sehingga terjadi defisit pada tahun 2000 sebesar US\$ 11 miliar untuk ekspor-impor sedangkan untuk domestik hanya US\$ 5 miliar (Pramono dalam Suhardono, Edi., 2023).

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali diperkenalkan konsep *Blue Economy* di Indonesia yang disampaikan melalui pidatonya tahun 2012 dalam acara *Leaders Valuing Nature* yang merupakan rangkaian dari Rio+20, di Brazil. Konsep tersebut menjadi arah baru dalam strategi pembangunan di Indonesia yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut (Suardi, Ahmad Raerah Arqi. 2019). Pada pidatonya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh dunia untuk melaksanakan *Green Economy* serta mengkampanyekan konsep *Blue Economy* yang menjadikan laut sebagai fokus utama dari konsep tersebut (Chandra, Y. A., Rustam, I., & Safitri, Purnami., 2021). Lebih lanjut, Presiden Susiolo Bambang Yudhoyono menyatakan “*For Indonesia, Blue Economy is our Next Frontier*” (Badan Kerja Sama Antar Parlemen dalam Chandra et all, 2021).

Pada masa kepemimpinan Jokowi-JK memiliki visi misi yang memprioritaskan geopolitik maritim untuk memperkenalkan politik ekonomi Indonesia, konsep tersebut berasal dari teori geopolitik yang dicetuskan oleh Alfredn Thayer Mahan, yang mengatakan bahwa kekuatan laut merupakan strategi negara untuk menguasai dunia (Fathun, Laode Muhamad., 2017). Priotitas pada sektor kemaritiman yang menjadi visi misi Jokowi-JK sesuai dengan program Nawacita yang dicetuskannya bahwa Indonesia merupakan negara maritim baik secara geografis maupun historis. Secara geografis dapat

dilihat dari keberadaan pulau-pulau di Indonesia, kemudian secara historis dapat dilihat berbagai aktivitas kemaritiman yang dilakukan oleh nenek moyang Indonesia yang telah dikenal dunia sebagai pelaut tangguh (Riwanto, Agus et al, 2023).

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo kebijakan poros maritim merupakan karakter kebijakan politik luar negeri yang mengarah pada unsur utama yaitu untuk membangun identitas budaya maritim Indonesia melalui kerja sama dan diplomasi antar negara seperti meningkatkan kerja sama dengan Amerika, Belanda, India, dan China (Amalia dalam Riwanto, Agus et al, 2023). Selain itu, berbagai kebijakan kemaritiman yang diterbitkan pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang meliputi Instruksi Presiden No.178 tahun 2014 serta terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya RI sesuai dengan Inpres No.10 tahun 2015. Lembaga-lembaga tersebut membawahi Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perhubungan. Terdapat lima pilar utama kebijakan maritim yaitu membangkitkan budaya maritim, pembangunan infrastruktur maritim, mengkapitalisasi sumber daya maritim, penguatan diplomasi maritim serta pertahanan pada sektor maritim yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada KTT Asia Timur (Fathun, Laode Muhamad., 2017). Selain itu, pada era Presiden Joko Widodo juga melanjutkan strategi *Blue Economy* dalam pemanfaatan laut dan sumber daya laut, selanjutnya terlibatnya Indonesia sebagai anggota.

Indonesia juga tergabung dalam organisasi regional yang beranggotakan negara-negara pesisir Samudra Hindia yaitu *Indian Ocean Rim Association (IORA)*. Samudra Hindia merupakan salah satu jalur perdagangan internasional yang strategis (Nisa, Aprilia Chairun., 2020). Bergabungnya Indonesia di IORA dapat berdampak baik terhadap konsep *Blue Economy*. Konsep *Blue Economy* berkomitmen terhadap kelestarian laut dan sumber dayanya. Untuk mengoptimalkan implementasi dari *Blue Economy*, terdapat lima pilar utama yang diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai arah kebijakan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut yaitu perluasan wilayah konservasi, penangkapan ikan berbasis kuota dan zona penangkapan, budidaya laut, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir, serta pengurangan sampah plastik laut (Luthan, Asia Khairunnisa., 2024).

Konsep *blue economy* sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs) United Nations (UN)* khususnya SDGs 14 yang berorientasi pada pemanfaatan lautan dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan Indonesia tentunya harus memperhatikan segala kebijakan yang diterapkan dan dampaknya terhadap

kelestarian laut. Oleh karena itu, tulisan ini berjudul ***Diplomacy Blue Economy: Pengaruh Indian Ocean Rim Association (IORA) terhadap Keberlanjutan Kelestarian Laut Indonesia*** yang bertujuan untuk membahas mengenai pengaruh *diplomacy Blue Economy* Indonesia terhadap kelestarian laut yang dikaji melalui keanggotaannya dalam IORA.

2. KAJIAN TEORITIS

Diplomasi Maritim

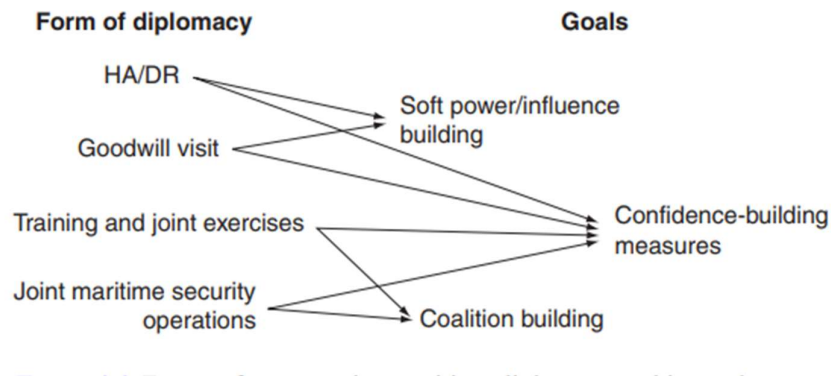
Diplomasi maritim menurut Christian Le Miere mencakup tiga kategori yaitu diplomasi maritim kooperatif, koersif, dan persuasif. Pertama, diplomasi maritim kooperatif merupakan diplomasi yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak untuk saling berinteraksi seperti kunjungan angkatan laut, latihan gabungan (*joint exercise*) dan operasi militer gabungan (*joint maritime security*), serta aktivitas lainnya seperti *Humanitarian Assistance (HA)* atau *Disaster Response (DR)*.

Misi kemaunisaan dan penanggulangan bencana juga merupakan ciri dari diplomasi maritim kooperatif yang menekankan bahwa kapal laut tidak hanya digunakan dalam pertempuran, tetapi juga dapat digunakan pada kegiatan lainnya. Misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana tersebut dapat mempengaruhi hubungan diplomasi suatu negara karena bantuan tersebut ditandai dengan keinginan Angkatan Laut (AL) dari negara pengirim untuk mendukung negara penerima. Pergerakan seperti ini merupakan upaya dalam meningkatkan hubungan diplomasi dengan membangun opini negara penerima. Praktek-praktek seperti ini disebut sebagai *soft power*. Oleh karena itu, diplomasi maritim kooperatif dapat dikatkan sebagai upaya melancarkan pelaksanaan *soft power* dengan menggunakan fasilitas *hard power* (Miere, Christian Le., 2014).

Diplomasi maritim kooperatif juga berupaya mencapai misi seperti kunjungan persahabatan (*goodwill visit*) angkatan laut ke berbagai negara baik itu negara berkembang maupun negara maju, hal ini bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomasi. Lebih lanjut, latihan gabungan dan operasi gabungan keamanan yang dilakukan dalam proses diplomasi maritim kooperatif bertujuan untuk membangun kapasitas angkatan laut diberbagai negara yang dapat menunjang hubungan diplomasi serta membangun kepercayaan antarnegara.

Pelaksanaan diplomasi maritim kooperatif bukan hanya angkatan laut yang berperan didalamnya, namun juga meliputi berbagai sektor lain seperti keterlibatan penjaga pantai serta badan kepolisian juga dapat melakukan diplomasi maritim kooperatif.

Hal ini dapat dilihat dari *operasi unified assistance* atau operasi bantuan terpadu di Sumatra yang tidak hanya melibatkan angkatan laut Amerika Serikat, tetapi juga melibatkan kapal penjaga pantai kelas *Hamilton*, USCGC *Munro* (Miere, Christian Le., 2014). Dalam memahami lebih lanjut mengenai diplomasi maritim kooperatif, Christian Le Miere menggambarkan bentuk pelaksanaan diplomasi maritim kooperatif pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Diplomasi Maritim Kooperatif

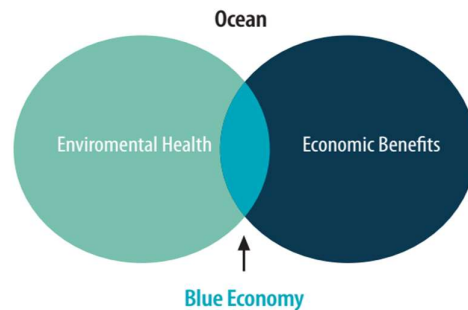
Sumber: Christian Le Miere, 2014

Kedua, diplomasi maritim persuasif yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan terhadap kekuatan maritim dan nasional suatu negara. Diplomasi ini berupaya untuk menunjukkan kekuatannya melalui aset kelautan seperti angkatan laut, hal ini ditandai dengan adanya “*showing the flag*” yang mengisyaratkan kekuatan negara. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan diplomasi maritim persuasif juga berupaya untuk mendapatkan prestise internasional. Ketiga, diplomasi maritim koersif memiliki beberapa tujuan yang meliputi penguatan militer, akses maritim global, melancarkan kepentingan militer, mengancam negara target, serta untuk memenangkan sengketa.

Blue Economy

Konsep *blue economy* merupakan pemanfaatan sumber daya laut dengan berorientasi keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memfasilitasi pembangunan dalam sektor kelautan yang berbasis keberlanjutan dan ramah terhadap lingkungan dan ekosistem laut. *United Nation Environment Programme* (UNEP) mendefinisikan *blue economy* adalah pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir dengan tujuan untuk mengkolaborasikan antara keberlanjutan ekosistem laut dan upaya membangun pengaruh ekonomi dalam lingkup internasional (UNEP dalam The Commonwealth., 2023). Di Indonesia sendiri, konsep *blue economy* mengacu pada

penjelasan Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang berbunyi “*Blue economy* atau ekonomi biru merupakan pendekatan untuk mempromosikan pengelolaan kelautan secara berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut, ekosistem laut, dan pesisir bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dengan melibatkan masyarakat” (Sambodo et al, 2023).



Gambar 2. Konsep *Blue economy*

Sumber. Patil et al., 2016

Definisi mengenai *blue economy* sangat beragam, namun secara umum dari berbagai definis tersebut menekankan bahwa konsep *blue economy* merupakan pemanfaatan sumber daya laut untuk meningkatkan ekonomi negara dengan memperhatikan keberlanjutan yang meliputi resiko kerusakan terhadap kelestarian laut. *Blue economy* memiliki pilar yang menjadi pedoman dari penerapan konsep tersebut dalam mengembangkan sumber daya laut. Pilar-pilar tersebut meliputi sektor lingkungan, ekonomi, sosial yang saling terintegrasi untuk mewujudkan keberlanjutan di Indonesia. Pada pilar lingkungan, penerapan *blue economy* ini mengacu pada pengelolaan sumber daya alam yang tidak berlebihan dan konservasi laut, serta memanfaatkan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan pada aktivitas kelautan. Kemudian, pada sektor ekonomi meliputi perikanan tangkap dan budidayanya (akuakultur) yang dapat menjadi nilai ekonomi, memanfaatkan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas lautan yang besar sebagai industri yang berbasisi kelautan, melakukan perdagangan, serta mendorong pariwisata yang berbasis kelautan. Terakhir, sektor sosial meliputi kesejahteraan, dan kesehatan dalam hal ini berorientasi pada masyarakat lokal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deksriptif. Studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan data yang mendalam dan berdasarkan kajian teoritis yang terkait dengan nilai, budaya, norma

yang berkembang pada objek penelitian (Sugiyono dalam Donesia et all, 2023). Jenis penelitian menggunakan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini adalah kajian literatur yang juga meliputi beberapa konsep dan teori yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis pengaruh *diplomacy blue economy* terhadap kelestarian laut Indonesia yang dilihat dari keanggotaanya dalam IORA.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

IORA merupakan organisasi regional di kawasan Samudera Hindia. Menurut data yang diperoleh dari portal IORA, organisasi kawasan tersebut beranggotakan sebanyak 23 negara yang terdiri dari Australia, Bangladesh, Komoro, Perancis, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Maladewa, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Singapura, Somalia, Afrika Selatan, Yaman, Arab, Thailand, Tanzania, dan Sri Lanka (IORA, 2024). Hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota IORA lainnya telah terbangun sejak beberapa abad-abad lalu, dimana masyarakat negara-negara di kawasan Samudera Hindia saling berinteraksi. Interaksi tersebut terjadi disebabkan para pedagang, pelaut, dan nelayan berlayar melewati Samudera Hindia yang merupakan jalur pelayaran, sehingga dalam pelayaran tersebut terjadi interaksi yang membangun kedekatan masyarakat negara di kawasan tersebut. Selain itu, Samudera Hindia merupakan perairan yang memiliki potensi ekonomi, sehingga membutuhkan visi bersama negara-negara di kawasan. Hal inilah yang melatarbelakangi kerja sama sosial-ekonomi di antara negara-negara di kawasan Samudera Hindia. Dalam proses interaksi tersebut kemudian dibentuk organisasi kawasan yaitu IORA pada tahun 1997 yang bertujuan mendorong kerja sama negara-negara di kawasan (Roza, Rizki., 2015). Indonesia sebagai salah satu negara anggota IORA tentunya memiliki kepentingan nasional. Untuk mewujudkan kepentingan nasional tersebut, Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menerapkan konsep *blue economy* melalui IORA (Nisa, Aprilia Chairun., 2020).

Implementasi Diplomasi *Blue Economy* Indonesia di IORA

Penerapan diplomasi *blue economy* di IORA ditandai dengan beberapa pertemuan awal yang meliputi pertemuan tingkat menteri, dialog, dan konferensi. Pada pertemuan Tingkat Menteri ke-14 di Perth, Australia tahun 2014 terdapat pembahasan mengenai konsep *blue economy*. Kemudian, pada tahun 2015 di India, menjadi dialog pertama mengenai *blue economy* yang membahas mengenai beberapa aspek yang terkait

dalam pelaksanaan *blue economy* seperti perikanan dan akuakultur, pemanfaatan energi terbarukan pada sektor kelautan, pelabuhan, dan eksplorasi mineral (Ahadin, Misbakun., 2020). Aspek-aspek tersebut menjadi kunci dalam penerapan konsep *blue economy*. Dilansir dari Aqua Barometer Agribisnis Kelutan dan Perikanan, di Indonesia telah mengimplementasikan akukultur berbasis *blue economy* yang dilaksanakan dalam skala kecil (*on farm*) pada yumina-bumina (sayuran dan mina/ikan-Buah dan mina/ikan). Selain itu, juga terdapat budidaya ikan dengan menggunakan sistem polikultur, pengembangan tambak undang serta pengolahan limbah, dan *Inegrated Multi Trophioc Aquaculture* (IMTA) yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dari akuakultur serta dengan menggunakan konsep IMTA dapat mengefisienkan lahan yang digunakan (Aqua., 2022). Kemudian, mengenai upaya pemanfaatan energi pada sektor kelautan dapat dilihat dalam penelitian pra-studi kelayakan pada pemanfaatan arus laut untuk pembangkit listrik tenaga arus laut di daerah Selat Pantar, Nusa Tenggara Timur (NTT). Lebih lanjut, penerapan konsep *blue economy* di Indonesia sesuai dengan dialog mengenai konsep *blue economy* dalam forum IORA adalah pelabuhan, hal ini dapat dilihat pada pengembangan proyek tol laut Indonesia yang menargetkan penguatan jalur pelayaran di wilayah Indonesia bagian Timur. Selain untuk menghubungkan jalur pelayaran Indonesia bagian timur dan Barat, proyek tol laut ini juga bertujuan untuk mempermudah akses jalur perdagangan internasional. Konsep dari tol laut terdiri dari akses regional yang meliputi dua pelabuhan besar dengan skala internasional yang melayani kapal besar di atas 3.00 TEU atau kapal panamax 6.000 TEU (Khoiriyah, A. Z., 2024).

Implementasi konsep *blue economy* diperkuat dalam Konferesnsi Tingkat Menteri pertama *blue economy* atau juga disebut IORA *Ministerial Blue Economy Conference* yang diadakan di Mauritius tahun 2015 menghasilkan Deklarasi mengenai *blue economy*. Deklarasi tersebut meliputi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan *blue economy* di wilayah Samudera Hindia yang meliputi aturan pemanfaatan sumber daya laut. Dalam deklarasi tersebut juga mengakui pentingnya *blue economy* terhadap sistem perikanan dan akuakultur yang berfokus untuk memastikan ketahanan pangan dan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dengan mata pencaharian yang berkelanjutan, energi laut terbarukan yang berfokus pada efisiensi biaya dalam pemanfaatan energi serta beradaptasi terhadap ancaman perubahan iklim, pelabuhan yang berfokus untuk mempromosikan perdagangan, investasi, dan konektivitas maritim di kawasan Samudera Hindia, serta eksplorasi mineral yang berfokus untuk mendorong

peluang bisnis baru yang menarik investasi di Samudera Hindia (Mauritius Declaration, 2015).

Indonesia dalam deklarasi tersebut menekankan diperlukan untuk menindaklanjuti konsep mengenai *blue economy*. Hal ini sesuai dengan Jakarta *Concord* yang membahas mengenai asosiasi lingkungan di Samudera Hindia. Jakarta *Concord* menekankan pentingnya *blue economy* sebagai pendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Samudera Hindia, salah satu komitmen yang disepakati dalam Jakarta *Concord* adalah mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya untuk mengurangi resiko lingkungan di kawasan Samudera Hindia. Selain itu dalam Jakarta *Concord* disepakati upaya untuk memperomosisikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, mempromosikan praktik berkelanjutan pada sektor kelautan dengan ramah lingkungan, dan meningkatkan bantuan teknis dalam pengembangan kapasitas untuk memperkuat perlindungan serta wilayah pelestarian pesisir dan laut. Dalam Jakarta *Concord* juga membahas pentingnya manajemen resiko bencana di kawasan Samudera Hindia pada wilayah pesisir dan laut yang disebabkan perubahan iklim, oleh karena itu dalam Jakarta *Concord* menekankan kerja sama dalam menangani isu tersebut melalui pengembangan kapasitas seperti peringatan dini, infrastruktur, serta meningkatkan ketahanan ekonomi untuk meminimalisir gangguan pada kegiatan ekonomi. Lebih lanjut, dalam Jakarta *Concord* juga membahas mengenai pariwisata dan pertukaran budaya yang berorientasi pada kelautan yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi masyarakat dalam mendorong ekonomi regional, mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan melalui kerja sama dengan negara anggota IORA yang lainnya, memanfaatkan potensi ekonomi melalui warisan budaya, serta mendorong investasi pada infrastruktur (Jakarta *Concord*, 2017). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa prioritas IORA dalam menerapkan konsep *blue economy* adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berorientasi pada keberlanjutan dan kelestarian laut.

Konsep *blue economy* tersebut memiliki keterkaitan dengan visi Indonesia menjadi Porors Maritim Dunia. Terdapat berbagai upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mewujudkan visi tersebut dengan menerapkan prinsip *blue economy* yang dapat dilihat dari kepemimpinan Indonesia di IORA tahun 2015-2017, diantaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IORA *Action Plan* 2017-2021.

Tabel 1. Action Plan IORA 2017-2021

Area Prioritas	Inisiatif Unggulan		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
Blue Economy - Memanfaatkan dan mengembangkan <i>blue economy</i> di kawasan	Membentuk kelompok kerja IORA mengenai <i>blue economy</i> Mengimplementasikan hasil dari <i>Blue Economy Core Group Workshop</i> sebagai inti dari Pertemuan Tingkat Menteri	Mengembangkan mekanisme kerja sama yang tepat dalam pembangunan berkelanjutan sektor <i>blue economy</i> termasuk program pelatihan dan peningkatan kapasitas	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pesisir melalui program peningkatan kapasitas dalam konsep <i>blue economy</i>

Sumber. ACTION PLAN IORA 2017-2021

Kepemimpinan Indonesia di IORA juga berperan penting dalam peningkatan penerapan konsep *blue economy*, yang dimana konsep tersebut menjadi prinsip dari pelaksanaan diplomasi antar negara anggota IORA. Indonesia dalam memimpin IORA berhasil membentuk *Working Group on the Blue Economy* (WGBE). WGBE merupakan salah satu hasil dari KTT *Action Plan* IORA tahun 2015-2017. (Nugroho, A. Y., & Sampe, K. R. D., 2020). Sesuai dengan tabel diatas, *Action Plan* IORA tahun 2017-2021 meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang. WGBE adalah inisiatif jangka pendek yang meliputi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) *blue economy*. Inisiatif jangka menengah dalam *action plan* IORA tersebut meliputi mekanisme kerja sama dalam pembangunan yang berlandaskan pada keberlanjutan di sektor *blue economy* seperti program pelatihan dan pengembangan kapasitas. Kemudian, inisiatif jangka panjang adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program dari konsep *blue economy*.

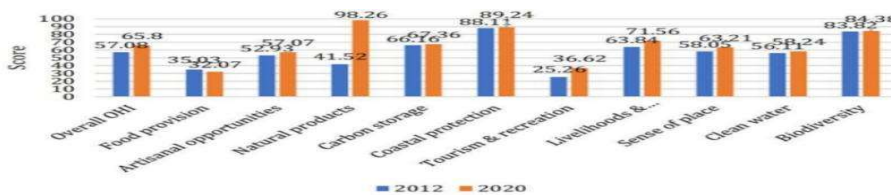
Indonesia juga memberikan usul dalam implementasi *blue economy* yang disebut sebagai *Voluntary Commitment* atau komitmen sukarela untuk setiap negara anggota IORA memberikan bantuan kepada negara anggota lainnya yang diusulkan dalam Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi dalam rangkaian *The 2nd IORA Blue Economy Conference*. Dalam kepemimpinannya Indonesia juga berupaya untuk mendapatkan kepercayaan negara anggota IORA lainnya bahwa Indonesia mampu untuk melaksanakan KTT IORA 1 yang didalamnya juga membahas mengenai *blue economy* (Nugroho, A. Y., & Sampe, K. R. D., 2020). Selain itu, pada tahun 2016 IORA melaksanakan *Blue Economy Summit II* dan IORA-IRENA *Renewable Energy Technical Working Session* di Abu Dhabi yang menghasilkan deklarasi mengenai *blue economy* untuk mendukung

implementasi *Paris Agreement* dan SDG 14 (*conserve and sustainably use of the oceans, seas and marine resource for sustainable development*).

Pada tahun 2017 IORA melaksanakan *The 3rd IORA Blue Economy Core Group (BECCG) Workshp* di Mauritius, pada agenda tersebut menekankan pentingnya inisiatif *blue economy* sesuai dengan hasil *Jakarta Concord*. Dalam agenda tersebut juga menekankan upaya konkret pemerintah dalam mengelola perikanan serta budi daya ikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan konsep *blue economy* (Suardi, Ahmad Raerah Arqi., 2019). Sesuai dengan konteks diplomasi maritim Indonesia berusaha untuk meningkatkan kepercayaan anggota IORA lainnya melalui berbagai upayanya untuk tetap terlibat aktif dalam pelaksanaan konsep *blue economy*.

Pengaruh Diplomasi *Blue Economy* terhadap Kelestarian Laut Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memanfaatkan potensi lautnya melalui konsep *blue economy*, mengupayakan peranannya sebagai anggota IORA untuk menerapkan konsep tersebut di kawasan Samudera Hindia. Namun, dalam menerapkan konsep tersebut Indonesia menghadapi tantangan seperti perampokan, pembajakan, dan penangkapan ikan secara ilegal yang dapat berdampak buruk terhadap kelestarian laut. Selain itu, polusi laut dan eksploitasi laut yang tidak berkelanjutan dapat mempengaruhi kelestarian laut. Oleh karena itu, Indonesia mendorong *blue economy* di IORA untuk meningkatkan ekonomi kawasan dengan mengedepankan kelestarian laut (Ahadin, Misbakun., 2020). Berdasarkan hal tersebut, diplomasi maritim dengan menerapkan konsep *blue economy* di IORA akan berimplikasi positif terhadap kelestarian laut Indonesia.



Gambar 3. *Ocean Health Index (OHI)*

Sumber. *Indonesian Blue Economy Roadmap*, 2023

Pada tahun 2020, upaya konservasi keluatan Indonesia yang merupakan salah satu prinsip penerapan *blue economy* berimplikasi positif terhadap kelestarian laut Indonesia dengan skor *Ocean Health Index (OHI)* mengalami peningkatan dari 57.08 pada tahun 2012 meningkat menjadi 65.8 pada tahun 2020 (Sambodo, L. A. A.T et all, 2023). Dengan menerapkan konsep *blue economy* di kawasan, salah satunya di kawasan Samudera Hindia yang merupakan jalur perdagangan akan berimplikasi positif terhadap

kelestarian laut Indonesia. Selain itu, melalui kerja sama dengan negara di kawasan Samudera Hindia dapat menjadi solusi terhadap tantangan pelaksanaan konsep *blue economy*. Hal ini dapat dilihat dari area prioritas IORA mengenai *maritime safety & security* yang meliputi pemberantasan pembajakan, parampoker bersenjata di laut, terorisme, penurunan kelestarian laut, dan eksploitasi sumber daya laut (IORA, 2024). Sehingga, melalui area prioritas tersebut keamanan pada sektor kalutan negara anggota IORA dapat terjaga. Hal ini akan berimplikasi positif terhadap kelestarian laut Indonesia sebagai salah satu anggota IORA.

Penerapan konsep *blue economy* di negara-negara lainnya juga menghasilkan dampak positif terhadap kelestarian laut seperti di Swedia, Jepang, dan Inggris. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Penerapan *Blue Economy* di sejumlah Negara lainnya

No.	Negara	Penerapan <i>Blue Economy</i>	Sektor Terkait	Peningkatan Produktivitas
1.	Jepang	Jepang menerapkan konsep <i>blue economy</i> pada beberapa aspek yang meliputi akukultur, pengelolaan perikanan, dan teknologi kelautan	Teknologi kelautan, perikanan, dan akuakultur	Meningkatkan hasil tangkapan ikan dengan menggunakan teknik yang berkelanjutan dan berhasil menggunakan teknologi yang efisien,
2.	Swedia	Swedia menerapkan konsep <i>blue economy</i> yang meliputi energi terbarukan kelautan, perlindungan ekosistem laut, dan wisata berkelanjutan.	Energi terbarukan, lingkungan, dan pariwisata.	Dapat mengembangkan teknologi dengan pemanfaatan energi gelombang laut serta meningkatkan ketertarikan wisatawan melalui ekowisata.
3	Inggris	Inggris menerapkan konsep <i>blue economy</i> pada restorasi habitat laut, pengelolaan sumber daya laut, dan riset kelautan.	Konservasi, sumber daya laut (perikanan), dan riset.	Meningkatkan kelestarian dan keanekaragaman hayati laut serta meningkatkan penelitian dan pengembangan inovatif yang berorientasi pada kelautan.

Sumber. Kementerian Kalutan dan Perikanan dalam Tunggal, M. H., 2024

Tabel tersebut menunjukkan dampak dari penerapan konsep *blue economy* terhadap kelestarian laut dan sumber daya laut di negara lainnya seperti Jepang berhasil meningkatkan hasil tangkap ikannya dengan menggunakan teknik yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip dari konsep *blue economy*. Kemudian di Swedia berhasil meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan akan mengurangi resiko tercemarnya kelestarian laut. Lebih lanjut, Inggris berhasil

meningkatkan kelestarian serta keanekaragaman hayati negeranya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan konsep *blue economy* berdampak positif terhadap kelestarian laut. Oleh karena itu, penerapan konsep *blue economy* di Indonesia melalui kerja samanya dengan negara anggota IORA lainnya dapat berimplikasi positif terhadap kelestarian laut Indonesia

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 70% laut dengan sumber daya laut yang sangat berpotensi. Oleh karena itu, kebijakan Indonesia akan berimplikasi terhadap pengelolaan sumber daya laut Indonesia yang dapat mempengaruhi kelestarian laut Indonesia. Sehingga, Indonesia perlu untuk memperhatikan implementasi kebijakan termasuk dalam keanggotannya di IORA. Sejumlah diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia di IORA yang membahas mengenai *blue economy* meliputi beberapa pertemuan seperti Pertemuan Tingkat Menteri ke-14 di Perth, *IORA Ministerial Blue Economy Conference* yang diadakan di Mauritius tahun 2015, *Jakarta Concord*, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *IORA Action Plan 2017-2021*, *Blue Economy Summit II* dan *IORA-IRENA Renewable Energy Technical Working Session* di Abu Dhabi 2016, *The 3rd IORA Blue Economy Core Group (BECG) Workshop* di Mauritius, serta beberapa konsep yang ditawarkan Indonesia dalam kepemimpinannya di IORA tahun 2015-2017 seperti *Working Group on the Blue Economy (WGBE)* dan *Voluntary Commitment*. Diplomasi maritim tersebut dilaksanakan Indonesia sebagai upaya dalam pelaksanaan konsep *blue economy* dalam kerja sama Indonesia dengan negara anggota IORA.

Penerapan *blue economy* di Indonesia menghadapi tantangan seperti perampokan, pembajakan, dan penangkapan ikan secara ilegal yang dapat berdampak buruk terhadap kelestarian laut. Selain itu, polusi laut dan eksploitasi laut yang tidak berkelanjutan juga dapat mempengaruhi kelestarian laut. Sehingga melalui kerja dengan negara anggota IORA lainnya dalam pengembangan penerapan konsep *blue economy* dapat berimplikasi positif terhadap kelestarian laut Indonesia, hal ini dapat dilihat dari area prioritas IORA mengenai *maritime safety & security* yang meliputi pembajakan, perampokan bersenjata di laut, terorisme, penurunan kelestarian laut, dan eksploitasi sumber daya laut. Sehingga, melalui area prioritas tersebut keamanan pada sektor kelautan negara anggota IORA dapat terjaga. Lebih lanjut, pada tahun 2020, upaya konservasi kelautan Indonesia yang merupakan bentuk penerapan dari konsep *blue economy* berimplikasi positif terhadap kelestarian laut Indonesia dengan skor *Ocean Health Index*

(OHI) mengalami peningkatan dari 57.08 pada tahun 2012 meningkat menjadi 65.8 pada tahun 2020. Selain itu, melihat penerapan konsep *blue economy* di sejumlah negara lainnya telah terbukti berhasil meningkatkan kelestarian laut. Sehingga, penerapan konsep *blue economy* dapat dikatakan berimplikasi positif terhadap kelestarian laut. Dalam pelaksanaan konsep *blue economy* diperlukan dukungan dan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta.

6. DAFTAR REFERENSI

- Aqua. (2022, February 15). Angkasa Putra: Blue economy dalam akuakultur. *Trobos Aqua*. Diakses pada 21 Oktober 2024, dari <http://trobosqua.com/detail-berita/2022/02/15/14/15684/angkasa-putra-blue-economy-dalam-akuakultur-indonesia>
- Chandra, Y. A., Rustam, I., & Safitri, Purnami. (2021). Implementasi kebijakan berbasis *blue economy* dalam kerangka kerjasama pemerintah Indonesia dengan FOA: Studi kasus mengenai unit pengolahan ikan di Kabupaten Lombok Utara. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 1–19.
- Darmawangsyah, et al. (2023). Mengungkap kejayaan sejarah maritim Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 2(3), 117–125.
- Donesia, et al. (2023). Konsep *blue economy* dalam pengembangan wilayah pesisir dan wisata bahari di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1950–1959.
- Fathun, L. M. (2017). Kebijakan geopolitik poros maritim di era Jokowi dalam filosofi frame ideologis. *Jurnal PIR*, 1(2), 135–152.
- Fitriani, I. N., & Juhadi, M. A. (2018). Fenomena pulau-pulau kecil terluar dan wilayah administratif Indonesia (Buku suplemen nonteks untuk pembelajaran IPS di SMP). *Journal Unnes*, 6(1), 24–32.
- India Ocean Rim Association. (2024). Member states. *IORA*. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://www.iora.int/member-states>
- IORA. (2017). *IORA Action Plan 2017–2021*.
- IORA. (2024). Maritime safety and security. *IORA*. Diakses pada 24 Oktober 2024, dari <https://www.iora.int/maritime-safety-security>
- Jakarta Concord. (2017). The Indian Ocean Rim Association: Promoting regional cooperation for a peaceful, stable, and prosperous Indian Ocean.
- Khoriyah, A. Z. (2024). Implementasi ekonomi biru Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(2), 1331–1356.
- Luthan, A. K. (2024, September 4). Transformasi ekonomi maritim melalui *blue economy* untuk perkuat pertumbuhan berkelanjutan Indonesia. *Fishlog*. Diakses pada 16

September 2024, dari <https://fishlog.co.id/blog/transformasi-ekonomi-maritim-melalui-blue-economy-untuk-perkuat-pertumbuhan-berkelanjutan-di-indonesia>

- Mauritius Declaration on Blue Economy. (2015). Declaration of the Indian Ocean Rim Association on enhancing blue economy cooperation for sustainable development in the Indian Ocean region.
- Miere, C. L. (2014). *Maritime diplomacy in the 21st century*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Mulyati. (2020). Wawasan nusantara sebagai sarana pembangunan nasional dan pembentukan karakter bangsa. *Jantra*, 15(1), 43–50.
- Nisa, A. C. (2020). Diplomasi maritim Indonesia dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). *Journal of Government Science*, 1(2), 51–63.
- Nugroho, A. Y., & Sampe, K. R. D. (2020). Upaya keterlibatan Indonesia dalam menginternasionalisasikan konsep blue economy studi kasus: Kepemimpinan Indonesia dalam IORA periode 2015–2017. *Global Insight Journal*, 5(2), 1–15.
- Patil, et al. (2016). Toward the blue economy: A promise for sustainable growth in the Caribbean; An overview.
- Riwanto, A., et al. (2023). *25 tahun demokrasi Indonesia*. Bandung: PT. Tubagus Lima Korporat.
- Roza, R. (2015). Indian Ocean Rim Association (IORA) dan kepentingan Indonesia di Samudera Hindia. *Journal Info Singkat Hubungan Internasional*, 7(6), 5–8.
- Sambodo, L. A. A. T., et al. (2023). *Indonesia blue economy roadmap*. Jakarta: Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS).
- Suardi, A. R. A. (2019). Diplomasi maritim Indonesia dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) terhadap penerapan blue economy. (Skripsi Sarjana, Universitas Fajar).
- Suhardono, E. (2023). *Kebijakan kemaritiman Indonesia: Formulasi dan implementasi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Sukamto. (2017). Pengelolaan potensi laut Indonesia dalam spirit ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 35–62.
- The Commonwealth. (2023). *Rapid readiness assessment for the transition to a sustainable blue economy*. Commonwealth Secretariat.
- Tunggul, M. H. (2024). Pemberdayaan potensi hasil laut berbasis blue economy guna mendukung ketahanan ekonomi nasional. *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Diakses pada 24 Oktober 2024.

Wahyuddin, Y. A., et al. (2022). Strategi kebijakan blue economy Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan pada era Joko Widodo. *Sriwijaya Journal of International Relations*, 2(2), 70–78.

Wiranto, S. (2020). Membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui kebijakan kelautan Indonesia dengan strategi pertahanan maritim Indonesia: Perspektif pertahanan maritim. *Jurnal Maritim Indonesia*, 8(2), 110–126.
